BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Apabila suatu negara berhasil dalam pembangunan ekonomi, sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga mengalami kenaikan, beda halnya dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara belum tentu negara tersebut mengalami keberhasilan pembangunan, karena pembangunan suatu negara diukur dengan tingkat kesejahteraan, keamanan, kualitas sumber daya termasuk sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Unsur utama dalam pembangunan ekonomi yaitu jumlah penduduk. Apabila suatu negara ingin berhasil dalam proses pembangunan maka kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan dan juga laju pertumbuhan penduduk harus dikendalikan, karena apabila suatu negara mengalami kepadatan penduduk dan tidak diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan maka akan berakibat pada pengangguran. Pengangguran yang tinggi pada suatu negara adalah salah satu penyebab kemisikinan. Masalah kemiskinan sendiri merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh banyak negara berkembang.

Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. (http://Wikipedia.com) Negara berkembang belum mampu memanfaatkan semua

faktor produksi yang dimiliki untuk meningkatkan kemakmuran penduduknya sehingga tetap dalam kemiskinan dan kemelaratan. Faktor produksi tersebut yaitu pertama faktor produksi alam. Faktor produksi alam atau sumber daya alam adalah semua kandungan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Dalam hal ini, negara-negara berkembang kurang bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga sulit mencapai suatu tingkat kemakmuran yang diharapkan. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja merupakan pelaksana dalam kegiatan produksi. Untuk negara berkembang sendiri faktor produksi tenaga kerja kualitasnya masih rendah, contohnya Indonesia. Indonesia dalam hal tenaga kerja jika diukur dari tingkat pendidikan dan kesehatan tenaga kerjanya masih digolongkan dalam kualitas yang cukup rendah. Faktor produksi yang ketiga yaitu faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah semua hasil produksi manusia yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Apabila suatu negara aliran modalnya kurang maka hal tersebut akan menyebabkan terhambatnya produksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi tersebut sangat penting dalam hal pengurangan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan sendiri menurut World Bank (2004) adalah masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. Kemiskinan merupakan masalah krusial yang dihadapi negara berkembang, seperti Indonesia. Beberapa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia yaitu pendapatan per kapita yang rendah,

jumlah penduduk yang tidak terkendali, tingkat pengangguran tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Faktor-faktor penentu tersebut dibutuhkan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan yang diambil pemerintah agar kemiskinan dapat diatasi di berbagai daerah di Indonesia.

Tabel 1.1

Data Urutan Provinsi yang Memiliki Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak Tahun 2015 (ribu jiwa).

No	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK MISKIN
1	Jawa Timur	4,789.1
2	Jawa Tengah	4,577.0
3	Jawa Barat	4,435.7
4	Sumatera Utara	1,463.7
5	Lampung	1,163.5
6	Nusa Tenggara Timur	1,159.8
7	Sumatera Selatan	1,145.6
8	Papua	859.2
9	Aceh	851.6
10	Nusa Tenggara Barat	823.9
11	Sulawesi Selatan	797.7
12	Banten	702.4
13	DI Yogyakarta	550.2
14	Riau	531.4
15	Sulawesi Tengah	421.6
16	DKI Jakarta	398.9
17	Kalimantan Barat	383.7
18	Sumatera Barat	379.6
19	Bengkulu	334.1
20	Maluku	328.4
21	Sulawesi Tenggara	321.9
22	Jambi	300.7
23	Papua Barat	225.4
24	Kalimantan Timur	212.9
25	Sulawesi Utara	208.5
26	Gorontalo	206.8

No	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK MISKIN
27	Kalimantan Selatan	198.4
28	Bali	196.7
29	Sulawesi Barat	160.5
30	Kalimantan Tengah	147.7
31	Kepulauan Riau	122.4
32	Maluku Utara	79.9
33	Bangka Belitung	74.1
34	Kalimantan Utara	39.7

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Jawa Tengah sendiri memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi yaitu terbesar ke-2 dari 34 provinsi di Indonesia setelah provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 4,577.0 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 4,789.1 ribu jiwa. Tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah menurut Bappenas dalam jurnal Seri Analisis Pembangunan Wilayah Jawa Tengah tahun 2015 menyatakan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Jawa Tengah selama kurun waktu 2010 – 2014 cenderung meningkat, namun masih dibawah rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih pesat dari Jawa Tengah.

Kebijakan sudah banyak dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, tetapi banyak kebijakan yang belum berhasil diterapkan. Hal tersebut bukan berarti tanpa alasan, karena ada beberapa jenis kemiskinan salah satunya kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup dan kebiasaan hidup. Dalam hal ini masyarakat sudah menjadi kebiasaan atau budaya mereka yang turun-temurun menjadikan masyarakat menjadi miskin, maka pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan

penanggulangan kemiskinan akan susah diterapkan dalam masyarakat apabila masyarakat sendiri tidak mau mengubah pola hidup atau kebiasaan mereka. Contohnya yaitu pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah terkadang juga dari faktor budaya yang diturunkan orang tua. Masyarakat yang miskin selain tidak mempunyai biaya yang cukup untuk menempuh pendidikan, biasanya juga dipengaruhi oleh faktor orang tua yang menganjurkan anaknya sekolah hanya sampai dengan jenjang sekolah dasar atau sampai sekolah menengah pertama. Hal tersebut dikarenakan mereka lebih memilih waktu untuk bersekolah mereka gunakan untuk bekerja. Dalam hal ini bisa dilihat dari IPM provinsi Jawa Tengah. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Salah satunya mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Tabel 1.2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 (angka indeks).

No	Tahun	IPM
1	2010	66.08
2	2011	66.64
3	2012	67.21
4	2013	68.02
5	2014	68.78
6	2015	69.49

Sumber: BPS Jawa Tengah

Data di atas bisa dilihat bahwa IPM pada provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan dari tahun 2010-2015. Hal ini berarti menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan. Bappeda Jawa Tengah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2017 yang dikutip dari http://bappeda.jatengprov.go.id/ menyebutkan angka IPM Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 69,49 angka indeks tidak mampu mengimbangi peningkatan IPM provinsi-provinsi lain di Indonesia terutama provinsi yang ada di Pulau Jawa. IPM Jawa Tengah menempati posisi 12 dari 34 provinsi di Indonesia. Jawa Tengah tertinggal dari Bali, Bangka Belitung, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kalimantan Utara, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Kepulauan Seribu, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Yogyakarta yang secara ekonomi memiliki kemampuan setara dengan Jawa Tengah. Hal tersebut berarti menandakan bahwa angka harapan hidup, kemampuan daya beli masyarakat, dan rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah masyararakat Jawa Tengah belum sebaik provinsi-provinsi yang disebutkan diatas, walaupun angka IPM Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun. Padahal ketiga aspek tersebut sangatlah penting bagi kemajuan sumber daya manusia. Terutama pada dimensi pengetahuan yang diukur melalui rata-rata

lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dengan dimensi pengetahuan tersebut secara tidak langsung juga dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013–2014 (juta orang)

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013		2014
		Februari	Agustus	Februari
1	SD ke Bawah	9,31	9,00	9,14
2	Sekolah Menengah Pertama	2,91	3,22	3,16
3	Sekolah Menengah Atas	3,13	3,14	3,37
4	Diploma I/II/III dan Universitas	1,15	1,11	1,09

Sumber : BPS Jawa Tengah

Menurut BPS Jawa Tengah berdasarkan data di atas jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi penduduk yang bekerja di Jawa Tengah yaitu pada Februari 2014 sebesar 9,14 juta orang dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Februari 2014 sebesar 3,37 juta orang. Sementara untuk pekerja yang berpendidikan tinggi merupakan yang terendah dan terus menurun dari tahun 2013-2014 yaitu Februari 2013 sebesar 1,13 juta orang, Agustus 2013 turun menjadi 1.11 juta orang dan Februari 2014 sebesar 1,09 juta orang. Rata-rata pekerja yang berpendidikan rendah bekerja sebagai buruh dan karyawan. Walaupun Indonesia sudah mewajibkan sekolah minimal 9 tahun, tetapi apabila pekerjaan sebagai buruh atau karyawan tersebut tidak mensyaratkan adanya

kriteria lulusan minimal maka angkatan kerja yang kualitas pendidikannya rendah akan cepat mendapatkan pekerjaan. Disisi lain, pendidikan yang rendah akan menghasilkan daya saing yang rendah pula. Para pekerja yang pendidikannya rendah tersebut akan kalah saing dengan pekerja yang mempunyai ilmu pengetahuan lebih. Apalagi perkembangan teknologi yang semakin canggih, apabila pekerja tidak bisa menguasai teknologi maka akan semakin sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Jika pekerja sulit bersaing maka akan berakibat pada meningkatnya pengangguran.

Tabel 1.4

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 (persen).

No	Tahun	TPT
1	2010	6,21
2	2011	7,07
3	2012	5,61
4	2013	6,01
5	2014	5,68
6	2015	4,99

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang relatif lambat maka akan mengakibatkan masalah pengangguran di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran menggambarkan ketidakberhasilan pembangunan suatu negara. Di Jawa Tengah tingkat pengangguran terbuka bergerak secara naik turun. Dan di

tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 0,69 persen. Menurut Tambunan (2001) pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antar lain: Pertama, jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan kemiskinan dengan tingkat konsumsinya. Kedua, jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan meyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Menurut Todaro (2000) cara terbaik dalam meningkatkan pendapatan perkapita yang digunakan untuk konsumsi tersebut pada tahun 1960 menurut para ahli ekonomi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan perkapita akan meningkat, jadi secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi keterbelakangan ekonomi. Keterbelakangan ekonomi ditandai dengan rendahnya pendapatan perkapita. Seperti dikatakan diawal pendapatan perkapita merefleksikan PDRB.

Tabel 1.5

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 (Juta Rupiah).

No	Tahun	PDRB
1	2010	623.224.621,33
2	2011	658.003.645,36
3	2012	690.461.017,10
4	2013	726.652.111,09
5	2014	763.369.944,34
6	2015	805.839.820,56

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat PDRB provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010-2015 terus mengalami kenaikan. Tetapi menurut BPS Jawa Tengah tahun 2014 PDRB provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke 25 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan belum berhasilnya pembangunan di Jawa Tengah, karena PDRB memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan suatu perekonomian diukur dari pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksikan. Untuk dapat menghitung kenaikan itu dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga yang tetap, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seharusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain.

Kesimpulan dari latar belakang di atas bahwa provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan, sehingga jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan fakta bahwa provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi terbesar kedua dalam hal jumlah penduduk miskin, padahal apabila ditinjau dari PDRB provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 selalu mengalami peningkatan. Telah banyak kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, salah satunya provinsi Jawa Tengah mempunyai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dibentuk pada tahun 2006. Dimana TKPK tersebut bertugas menanggulangi masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah?

5. Bagimana pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan IPM secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Peneletian

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.
5. Menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan IPM secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1) Bagi penulis

Penelitian ini bagi penulis sendiri, menambah wawasan atau ilmu pengetahuan baru dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2) Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh dari PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia sehingga dapat digunakan sebagai pilihan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

3) Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disususn dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab 1 Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V kesimpulan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian yang ernah dilakukan yang sesuai dengan penelitian penulis, landasan teori yang menjadi sumber acuan dalam penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data penelitian dan pembahasan hasil temuan-temuan dalam penelitin.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukakn dan rekomendasi atas rumusan masalah yang ada.